

## MODEL KEBIJAKAN RESPONSIF PEMULIHAN BENCANA LETUSAN GUNUNG SINABUNG

**Olivia Oktorie**

Alumni Program Magister Pendidikan Geografi FIS UNP

✉ ochy.oliviaoktorie@gmail.com

### ABSTRACT

The research aims to design emergency response and recovery policies eruption of Mount Sinabung, conducted using AHP (Analytical Hierarchy Process) with priority policy directions and implications based on the technique of FGD (Focus Group Discussion). From the analysis that has been done, there are five policy priorities that can be taken into consideration in decision making with respect to emergency response and disaster recovery Sinabung eruption, namely: 1) rehabilitate the economic system and the economic system developing creative for the victims of the eruption of Mount Sinabung, 2) designing programs psychological recovery of child victims of the eruption of Mount Sinabung, 3) conduct accelerated relocation of the residential community located in hazardous zones eruption of Mount Sinabung, 4) conservation of water resources Sinabung mountain areas, and 5) building social capital community disaster response area of Mount Sinabung based custom, religion, and science.

**Keyword : Policy, Emergency, Disaster**

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak dalam lingkaran gunung api (*Ring of Fire*) (Hermon, 2010; Hermon, 2012; Hermon, 2014; Hermon, 2017). Posisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dimana keberadaannya masih dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebelum tahun 2010, Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung api dengan klasifikasi Tipe B. Sejak Agustus 2010, Gunung Sinabung mengalami peningkatan aktivitas dengan mengeluarkan asap, abu vulkanis, dan lava, sehingga berubah status menjadi Tipe A. Menurut Roeslan (2005), klasifikasi tipe A merupakan gunung yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sejak sesudah tahun 1600, sedangkan gunung berapi yang pernah meletus sebelum tahun 1600 namun tidak diketahui kapan waktu kejadiannya dengan pasti merupakan Tipe B (Hermon, 2012).

Berbagai aktivitas Gunung Sinabung tersebut, tentu saja memberikan dampak positif maupun dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat sekitar. Debu vulkanis yang tersembur hingga 5.000 meter di udara (Ebo, 2010) yang terus menyebar ke berbagai wilayah sekitar gunung api, menyebabkan lahan pertanian seluas 15.341 ha terancam gagal panen (Hermon, 2001; Hermon, 2006; Hermon, 2009; Alexander, 2010; Oktorie, 2017). Selain kehilangan sumber pendapatan, masyarakat sekitar Gunung Sinabung juga mengalami kerugian kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur rumah ataupun umum, mengalami gangguan kesehatan khususnya penyakit saluran pernafasan (ISPA), mengalami kelangkaan bahan pangan dan masalah pendidikan yang terpaksa harus diliburkan (Hermon, 2010).

Mengetahui banyaknya dampak yang diakibatkan oleh letusan Gunung Sinabung baik secara materil maupun non materil, mengharuskan pemerintah setempat mengeluarkan berbagai kebijakan. Namun, kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilakukan dirasakan belum optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang efektif, holistik (Hermon, 2009; Hermon, 2015; Hermon, 2016) dan tepat sasaran. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang mengeluh atas kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk dapat merumuskan kebijakan tanggap darurat dan pemulihan bencana letusan Gunung Sinabung berbasis *Research of Geography*.

## **METODE**

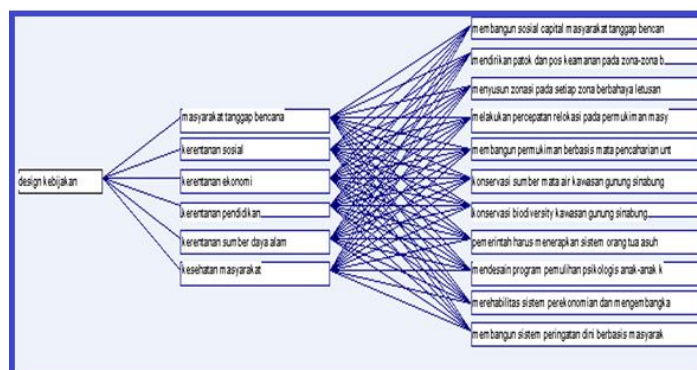
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui FGD dengan responden masyarakat terdampak bencana, pemerintah, ahli kebencanaan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebencanaan, pemuka adat dan agama, dan pakar-pakar di bidang pendidikan dan perguruan tinggi untuk merumuskan alternatif kebijakan serta implementasi serta implikasi dari prioritas kebijakan. Analisis prioritas kebijakan dilakukan melalui teknik AHP (Hermon, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau mengungsi dengan berbagai alasan yang membuat pemerintah kesulitan dalam merealisasikan kebijakan. Sedangkan masyarakat

menyatakan kebijakan yang telah dijalankan gagal dilaksanakan karena belum lagi berbasis *research* dan masyarakat, sehingga masyarakat mengabaikan dan menolak beberapa kebijakan pemerintah. Diantaranya adalah merelokasi masyarakat yang berada di zona berbahaya dengan jaminan pemberian rumah dan lahan yang luasnya sama dengan lahan sebelumnya. Kebijakan ini masih belum terlaksana karena masyarakat sendiri menolak untuk pindah dengan alasan mereka tidak mau meninggalkan tanah leluhur mereka. Selain itu, karena kondisi tempat pengungsian yang kurang nyaman, banyaknya kebutuhan yang harus mereka cukupi, menyebabkan ada beberapa masyarakat yang kembali ke rumah mereka dengan alasan ingin ternak dan tanaman yang siap panen, meskipun sudah dilarang karena berada pada zona berbahaya. Dari bidang pendidikan, pemerintah memberikan kebijakan dengan memberikan santunan perlengkapan sekolah dan siswa korban Sinabung dititipkan ke sekolah lain sampai proses relokasi tempat-tempat belajar siswa selesai. Tentu ini tidak mudah bagi siswa, di samping harus belajar dalam kondisi psikis yang masih trauma, juga harus beradaptasi lagi di lingkungan belajar baru, baik dari segi sosial maupun proses pembelajaran yang diterima.

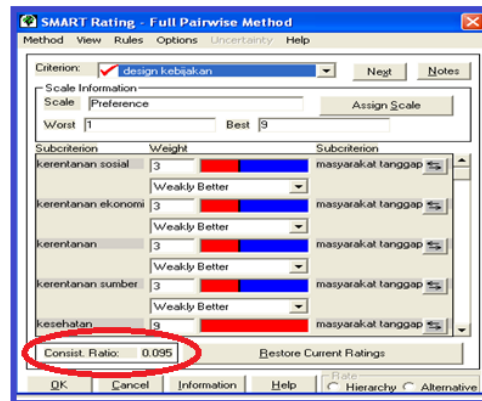
Penelitian kebijakan yang sudah dilakukan, dapat diambil lima kriteria yang digunakan untuk mendesain hierarki kebijakan, yakni masyarakat tanggap bencana, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan pendidikan, kerentanan sumber daya alam, dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut disusun berbagai alternatif kebijakan (Gambar 1), yang kemudian didapatkan prioritas kebijakan.



**Gambar 1. Desain Hirarki Kebijakan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana Letusan Sinabung**

Dari sebelas alternatif kebijakan tersebut, akan dipilih lima prioritas kebijakan berdasarkan perhitungan *Consistency ratio* dengan syarat data harus bersifat

konsisten atau  $<0.1$ . Gambar 2 menunjukkan nilai *Consistency ratio* yang didapat adalah 0,095 (Gambar 2). Artinya, hierarki kebijakan yang disusun dalam penelitian ini adalah konsisten dan dapat digunakan.



**Gambar 2. Consistency Ratio ( $<0,1$ ) (2014)**

Prioritas kebijaksn sesuai dengan decision scores yang paling tinggi. Lima prioritas kebijakan yang didapat yaitu; (1) Merehabilitasi system perekonomian dan mengembangkan system ekonomi kreatif untuk masyarakat korban letusan Gunung Sinabung (0,077), (2) Mendesain program pemulihan psikologis anak-anak korban bencana letusan Gunung Sinabung (0,073), (3) Melakukan percepatan relokasi pada permukiman masyarakat yang berada pada zona-zona berbahaya letusan Gunung Sinabung (0,064), (4) Konservasi sumber mata air kawasan Gunung Sinabung (0,062), (5) Membangun sosial capital masyarakat ttanggap bencana kawasan Gunung Sinabung berbasis adat, agama, dan ilmu pengetahuan (0,050).

Merehabilitasi sistem perekonomian dan mengembangkan sstem ekonomi kreatif untuk masyarakat korban letusan Gunung Sinabung dapat dilaksanakan melalui mendirikan pusat-pusat kursus keterampilan, memberi modal untuk usaha kecil da menengah, dan membuka lapangan pekerjaan berbasis keterampilan ekonomi kreatif. Sedangkan, untuk mendesain program pemulihan psikologis anak-anak korban bencana letusan Gunung Sinabung dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelompok bermain anak berbasis keluarga untuk pemulihan mental melalui konselor/psikiater dan memberikan hiburan kepada korban bencana letusan melalui kelengkapan permainan dan buku bacaan.

Melakukan percepatan relokasi pada permukiman masyarakat yang berada pada zona-zona berbahaya letusan Gunung Sinabung dilakukan melalui pemetaan kepemilikan tanah, menyegerakan pembukaan lahan baru, dan pendataan jumlah pengungsi yang akan direlokasi. Sedangkan konservasi sumber mata air kawasan Gunung Sinabung perlu dilakukan riset untuk mendeteksi kerusakan sumber mata air, meneliti tingkat kelayakan air untuk dikonsumsi, dan pemetaan perbaikan kualitas DAS di kawasan Gunung Sinabung. Membangun *sosial capital* masyarakat tanggap bencana kawasan Gunung Sinabung berbasis adat, agama, dan ilmu pengetahuan melalui pembentukan forum komunikasi antar pemuka adat dan agama dan memberikan sosialisasi mitigasi bencana berbasis IPTEKS (Hermon *et al.*, 2017; Hermon *et al.*, 2018; Kristian dan Oktorie, 2018).

## KESIMPULAN

Prioritas kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan tanggap darurat dan pemulihan bencana letusan Sinabung, yaitu; 1) merehabilitasi sistem perekonomian dan mengembangkan sistem ekonomi kreatif untuk masyarakat korban letusan Gunung Sinabung, 2) mendesain program pemulihan psikologis anak-anak korban bencana letusan Gunung Sinabung, 3) melakukan percepatan relokasi pada permukiman masyarakat yang berada pada zona-zona berbahaya letusan Gunung Sinabung, 4) konservasi sumber daya air kawasan Gunung Sinabung, dan 5) membangun *sosial kapital* masyarakat tanggap bencana kawasan Gunung Sinabung berbasis adat, agama, dan ilmu pengetahuan.

## PUSTAKA

- Alexander. 2010. Waspada Gunung Sinabung. <http://www.medanmagazine.com>
- Ebo A.G.A. 2010. Gunung Sinabung Meletus. <http://www.regional.kompas.com>
- Eriyatno dan Sofyar, F. 2007. Riset Kebijakan. Metode Penelitian Untuk Pascasarjana. Bogor: IPB. Press
- Hermon, D. 2001. Studi Kontribusi Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Epipedon. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Andalas. Padang
- Hermon, D. 2006. Buku Ajar Geografi Tanah. Jurusan Geografi FIS. Padang
- Hermon, D. 2009. Dinamika Permukiman dan Arah Kebijakan Pengembangan Permukiman pada Kawasan Rawan Longsor di Kota Padang Sumatera Barat. Disertasi. PSL. IPB. Bogor
- Hermon, D. 2010. Geografi Lingkungan: Perubahan Lingkungan Global. UNP Press

- Hermon, D. 2012. Dinamika Cadangan Karbon berdasarkan Perubahan Tutupan Lahan menjadi Lahan Permukiman di Kota Padang. *Forum Geografi*. Vol. 26. No. 1
- Hermon, D. 2014. Impact of Land Cover Change on Climate Change Trend in Padang, Indonesia. *Indonesia Journal of Geography*. Vol. 46. No. 2: 138-142
- Hermon, D. 2015. Estimate of Changes in Carbon Stocks on Land Cover Change in the Leuser Ecosystem Area. *Forum Geografi. Indonesia Journal of Spatial and Regional Analysis*. Vol. 29. Issue 2: 187-196
- Hermon, D. 2016. The Strategic Model of Tsunami Based in Coastal Ecotourism Development at Mandeh Regions, West Sumatra, Indonesia. *Journal of Environment and Earth Science*. Vol. 6. No. 4: 40-45
- Hermon, D., Paus, I, Oktorie, O, and Ratna, W. 2017. The Model of Land Cover Change into Settlement Area and Tin Mining and its Affecting Factors in Belitung Island, Indonesia. *Journal of Environment and Earth Science*. Vol. 7. No. 6: 32-39
- Hermon, D. 2017. *Climate Change Mitigation*. Rajawali Pers (Radjagrafindo). Jakarta
- Hermon, D., Putra, A. & Oktorie, O. 2018. Suitability Evaluation of Space Utilization Based on Environmental Sustainability at The Coastal Area of Bungus Bay in Padang City, Indonesia. *International Journal of GEOMATE*. Vol. 14, Issue 41: 193-202.
- Kristian, A and O. Oktorie. 2018. Study of Coastal Mangrove Conservation in the World. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*. Vol. 2. No. 1: 49-52
- Oktorie, O. 2017. A Study of Landslide Areas Mitigation and Adaptation in Palupuah Subdistrict, Agam Regency, West Sumatra Province, Indonesia. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*. Vol. 1. No. 1: 43-49
- Roeslan K. 2005. *Indonesia Adalah Laboratorium Alam Raksasa*. Kompas. Jakarta